

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO 112/DSN-
MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA MENYEWA SAWAH
BAYAR *MBURI*
(Studi Kasus di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong
Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

**Oleh:
Fidha Farahana
NIM. C92217138**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Fidha Farahana

NIM : C92217138

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum /Hukum Perdata Islam /Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No 112/DSN-
MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Sawah Bayar
Mburi (Studi Kasus di Desa Kedung Boto Kecamatan
Porong Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 16 Maret 2021
Saya yang menyatakan,

Fidha Farahana
C9217138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fidha Farahana NIM.C92217138 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Maret 2021
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sumarkan', with a stylized flourish at the end.

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fidha Farahana NIM. C92217138 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



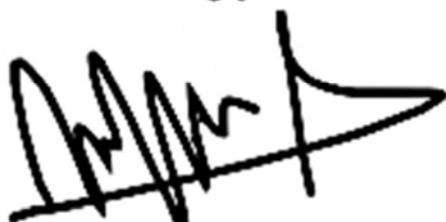
Dr. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji II,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Dr. Sri Wigati, M.El.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,



Adi Darmahuri, M.Si.
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 07 April 2021
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FIDHA FARAHANA
NIM : C92217138
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : fidhafara@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP

SEWA MENYEWA SAWAH BAYAR MBURI (STUDI KASUS DI DESA KEDUNG BOTO

KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2021

Penulis

(FIDHA FARAHANA)

ABSTRAK

Judul dari penelitian skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No 112/DSN/MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Sawah Bayar *Mburi* (Studi Kasus di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo)”. Adanya skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : (1) Bagaimana praktek sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ? (2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No 112/DSN/MUI/IX/2017 Terhadap Sewa Menyewa Sawah Bayar *Mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ?.

Hasil penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode kualitatif analisa deskriptif memakai pola pikir deduktif. Adapun alur dari analisis tersebut yaitu penelitian yang berdasarkan pada teori tentang *ijarah* yang kemudian akan dihubungkan dengan kegiatan yang ada di lapangan yaitu tentang Sewa Menyewa Sawah Bayar *Mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, Sewa Menyewa Sawah Bayar *Mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo merupakan sewa menyewa sawah yang pembayarannya dibayar ketika akhir atau ketika sudah panen dengan pembayaran menggunakan uang dan bagi hasil. Kedua, menurut hukum islam dan Fatwa DSN No 112/DSN/MUI/IX/2017 tentang ijarah bahwa pelaksanaan sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto diperbolehkan karena sesuai dengan syarat dan rukunnya *ijarah*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat desa Kedung Boto masih ada beberapa pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar upah sesuai dengan jumlah dan tenggang waktu yang sudah ditentukan ketika perjanjian dilaksanakan. Hal tersebut melanggar hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedua belah pihak dan dapat diindikasikan dalam kategori ingkar janji yang sesuai dengan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak yaitu orang yang mempunyai sawah (*Mu'jir*) dan orang yang menyewa sawah (*Musta'jir*) agar lebih memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Kepala Desa Kedung Boto.....	34
3.2 Batas Geografi Desa Kedung Boto	35
3.3 Luas Wilayah Desa Kedung Boto	36
3.4 Jumlah Penduduk Desa Kedung Boto.....	36
3.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kedung Boto	47
3.6 Mata Pencarian Masyarakat Desa Kedung Boto	48
3.7 Keadaan Agama Masyarakat Desa Kedung Boto	40
3.8 Daftar Narasumber	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor pertanian merupakan kunci dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dapat dilihat dari sebagian besar mata pencaharian rakyat Indonesia berasal dari sektor pertanian. Pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama dengan presentasi sebesar 27,33 persen¹.

Jawa timur merupakan provinsi yang penduduknya didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai petani sehingga menjadikan Jawa timur sebagai lumbung padi terbesar di Indonesia. Jawa timur merupakan penghasil padi sawah terbanyak di Indonesia dengan jumlah 12.432.793,00 ton pada tahun 2017. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu dari sekian kabupaten yang memproduksi padi sawah di Jawa Timur dengan luas lahan 32.385,00 Ha pada 2017 kabupaten Sidoarjo menghasilkan padi sawah sebesar 218.900,00 ton².

Pada tahun 2019 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sidoarjo melebihi IKP nasional Yaitu 73,55 untuk Sidoarjo, sedangkan IKP untuk nasional yaitu 54,8. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan IKP dari tahun ke tahun. Salah

¹Humas BPS. *Jumlah Angkatan kerja*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/> diakses pada 5 November 2020

² Kementerian Pertanian RI.. *Produksi Padi sawah*. Pusat Data Dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian 2016. <https://aplikasi2.pertanian.go.id/bdsp/id/lokasi>, diakses pada 5 November 2020

Permasalahan muncul ketika timbul suatu masalah yang diluar kuasa orang yang menyewa sawah (*musta'jir*) seperti adanya hama yang merusak tanaman, perubahan cuaca yang ekstrem seperti terjadinya banjir ataupun kekeringan. Alhasil si orang yang menyewa sawah (*musta'jir*) juga mengalami kerugian karena masalah yang timbul diluar kuasa orang yang menyewa sawah (*musta'jir*). Faktor inilah yang menimbulkan orang yang menyewa sawah (*musta'jir*) tidak mau membayar upah sewa menyewa yang sudah di sepakati diawal dengan dalih orang yang menyewa sawah (*musta'jir*) mengalami kerugian karena gagal panen di karenakana apabila orang yang menyewa sawah mengalami gagal panen maka orang yang menyewa sawah merasa rugi karena hasil panen dikurangi untuk membayar upah dan keperluan lainnya hasilnya kurang dari hasil panen. padahal orang yang mempunyai sawah (*mu'jir*) sudah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan sawah agar di kelola oleh orang yang menyewa sawah (*musta'jir*). Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pihak yang mempunyai sawah. Dan hal ini bisa menimbulkan ingkar janji atau yang biasa disebut dengan wanprestasi.

4

Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktek sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan atau deskripsi singkat tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dalam lingkup masalah sewa menyewa sawah sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang sudah ada :

Ada beberapa skripsi yang meneliti tentang praktek akad sewa menyewa sawah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Naila Rohmatillah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2016 dengan judul tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perjanjian sewa sawah nggantung pari di Desa becironegoro kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo.⁶ Penelitian ini menjelaskan tentang perjanjian sistem sewa sawah *nggantung pari*. perjanjian sewa sistem *nggantung pari* adalah perjanjian sewa menyewa sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Becironegoro dan kegiatan sewa tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Becironegoro , ketentuan perjanjian sewa menyewa sawah sistem *nggantung pari* yaitu pembayaran upah sewa dilakukan diawal yaitu ketika kesepakatan berlangsung berupa uang tunai dan

⁶ Naila Rohmatillah, *tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perjanjian sewa sawah nggantung pari di Desa becironegoro kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

Persamaan penelitian yang dilakukan Naila Rohmatilah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian yang membahas tentang sewa menyewa sawah, sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian Naila Rohmatilah menggunakan sistem *nggantung pari* yang meneliti masalah pembayaran dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang praktek sewa menyewa bayar *mburi* yang terjadi di Desa Kedung Boto.

- ⁷ Husnul Zamzami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuh benda Kecamatan Bumujawa Kabupaten Tegal)*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Walisongo , Semarang 2018).

Persamaan penelitian Abdul Hafiz Sairasi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang praktek sewa menyewa (*Ijarah*). Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafiz di dasarkan pada pendapat ulama sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti di dasarkan pada hukum islam dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017

¹⁰Abdul Hafiz Sairazi, *pendapat ulama terhadap praktek sewa menyewa sawah di kabupaten hulu sungai tengah*, Jurnal vol 1 No 2 (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari, 2017)

mburi di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo” yang di dalamnya terdapat penelitian baru tentang sistem sewa menyewa sawah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktek sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktek sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bidang keilmuan dalam hal teori. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang fiqh muamalah dalam masalah sewa menyewa (*ijarah*) sawah.
2. Bidang terapan (praktis) , bagi Penulis dapat menambah wawasan keilmuan mengenai sewa menyewa sawah di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan untuk Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Kedung Boto tentang sewa menyewa sawah khususnya untuk orang yang menyewa sawah (*musta'jir*) dan orang yang mempunyai sawah (*mu'jir*) yang terlibat dalam praktek sewa menyewa sawah

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian¹¹. Agar mendapatkan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, penulis memandang perlu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian, sebagai berikut :

- a. Hukum Islam : Suatu aturan, kaidah yang di turunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat.¹² Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hukum yang mengatur akad *ijarah* berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah*.
- b. Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 adalah Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *Ijarah*. Penetapan di Jakarta pada tanggal 19 September tahun 2017
- c. Sewa Menyewa sawah (*Ijarah*) : pengambilan manfaat terhadap sawah yang sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dengan adanya imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan.¹³.
- d. Bayar *mburi*: Sistem pembayaran sewa menyewa sawah yang upah sewanya di bayarkan diakhir ketika sudah panen dengan pembayaran upah berupa uang dan bagi hasil panen sebesar 25%

¹¹ Nadliyatul Mufidah , Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Ampel, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , 2019), 8

¹² Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta : Gramasurya, 2015), 2

¹³ SRI Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan ; FEBI UIN-SU Press, 2018) , 194

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan metode penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang penelitiannya menggunakan analisis dan mengkaji tentang bekerjanya hukum di masyarakat¹⁴. Dimana penelitian ini dalam hal mencari data yang valid dan benar dilakukan langsung turun ke lapangan dengan mengamati secara langsung praktek sewa menyewa di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong.

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Kedung Boto Kec Porong Kab Sidoarjo, karena di Desa tersebut terjadinya permasalahan tentang praktek sewa menyewa (*ijarah*).

3. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
- b. Data tentang sewa menyewa sawah di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta , 2004) 69

- 1) Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontenporer* , 2017
- 2) Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2017
- 3) Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, 2018
- 4) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* , 2017

Untuk memperoleh data yang sebenarnya, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mengamati dan mendokumentasikan penelitian dilaksanakan¹⁶. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis meneliti tentang terjadinya praktek sewa menyewa sawah di Desa Kedung Boto.
- b. Interview atau wawancara, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan beberapa informasi secara tatap muka dengan beberapa narasumber yang merupakan warga asli desa tersebut. Sehingga dapat memberikan informasi tentang perjanjian sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto.

¹⁶ Suryana, *Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 51

Sidoarjo.

B. Pola Pikir Deduktif. Landasan teori dipakai untuk meninjau dan memaparkan tentang akad sewa menyewa sawah dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI untuk meninjau dan menganalisis tentang penerapan sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

2. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisikan Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

B. Pola Pikir Deduktif. Landasan teori dipakai untuk meninjau data dan memaparkan tentang akad sewa menyewa sawah dalam hukum islam dan Fatwa DSN-MUI untuk meninjau dan menganalisis tentang praktek sewa menyewa sawah bayar *mburi* di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisikan Pendahuluan, membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang didalamnya membahas sewa menyewa dalam hukum islam dan Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijarah* yang menjelaskan tentang pengertian sewa-menyewa dalam Islam, dasar hukum, rukun sewa menyewa, syarat sewa-menyewa, hak dan kewajiban , dan masa berakhirnya akad *ijarah* .

²² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya* , (Tulungagung : Akademia Putaka, 2018) 121

LANDASAN TEORI TENTANG SEWA MENYEWA

Sewa menyewa dikenal dengan istilah *Ijarah* dalam konsep hukum

Menurut sudut pandang Ali Fikri, *ijarah* menurut bahasa dengan **الْكَرَاءُ أَوْ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ** Yang artinya sewa menyewa jual beli manfaat. Sedangkan menurut Sayid Sabiq mengemukakan : *Ijarah* diambil dari kata “Al-Ajr” yang artinya “iwadh” (imbalan), dari pengertian ini pahala “tsawah” dinamakan ajr (upah/pahala).

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu :

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah , 2017) , 117

21

Pemilik jasa atau barang disebut *Mu'jir* (orang yang menyewakan). Orang yang membutuhkan jasa atau barang disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Sesuatu yang diambil manfaat disebut *Mu'jar* (barang sewaan). Sedangkan harga/imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah). Setelah terjadinya akad *Ijarah* berlangsung, orang yang menyewakan berhak mengambil upah, maka dari itu akad tersebut dapat dinamakan pula *mu'addhah* (penggantian).⁶

Landasan dasar hukum yang dipakai oleh para ulama yang membahas diperbolehkannya *ijara* yaitu diambil dari Al-Qur'a dan Hadis Rasulullah. Beberapa diantara landasan dasar hukum yang membahas *ijarah* sebagai berikut⁷ :

a. Al-Qur'an Surat Al-Talaq ayat 6

Artinya : Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.⁸

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2014), Surat Al-Baqarah ayat 233, 37.

1. Orang yang berakad (Aqid)

” Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu *Mu’jir* ialah : orang yang memberikan upah atau yang menyewakan dan *Musta’jir* ialah orang yang menerima upah untuk untuk melakukan sesuatu dan yang dan menyewa sesuatu “

2. Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

Dalam Hukum Perikatan Islam ijab diartikan sebagai “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qabul ialah “ suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab “. ¹⁴

3. Upah (*Ujrah*)

Ujrah yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat sebagai berikut :

- a. Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail
- b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2018), 54

mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *Ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.¹⁶
3. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
4. Objek *Ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh orang yang menyewa sawah. Umpamanya rumah harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada orang yang menyewa sawah apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
5. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2018), 53

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a. Pihak pemilik objek wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si orang yang menyewa sawah.
 - b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c. Memberikan si orang yang menyewa sawah kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa.
 - d. Menanggung si orang yang menyewa sawah terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - e. Pemilik objek berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.

[illegible]

B. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti jual beli.

C. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin diteruskan.

D. Telah selesainya masa sewa kecuali udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam dal ini *ijarah* dianggap belum selesai.²⁰

1) Ketentuan Umum ²¹

- ²¹ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah*, 2017, (Jakarta : DSN-MUI, 2017) , 3

bulan Februari 2020.

2. Keadaan Geografis Desa Kedung Boto

Desa Kedung Boto merupakan salah satu desa yang ber Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Pusat pemerintahan Desa K Boto terletak di dusun Kedung Boto RT 07 RW 02 . Secara geografis Kedung Boto berbatasan dengan :

Tabel 3.2

Batas Geografi Desa Kedung Boto²

Desa Kedung Boto merupakan salah satu desa yang ber Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Pusat pemerintahan Desa K Boto terletak di dusun Kedung Boto RT 07 RW 02 . Secara geografi

Kedung Boto berbatasan dengan :

Tabel 3.2

Batas Geografi Desa Kedung Boto²

Batas Geografi Desa Kedung Boto²

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Pesawahan	Tanggula
Selatan	Lajuk	Gempol
Timur	Candipari	Jabon
Barat	Waung	Krembun

Setiawati, D., & Setiawati, D. (2021). *Setiawati, D., & Setiawati, D. (2021). Sekretariat Desa Kedung Boto Tahun 2021*

B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Sawah Bayar *Mburi* Di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo

Gambar 3.2 keadaan lahan persawahan Desa Kedung Boto



Sewa menyewa di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yaitu pertukaran manfaat barang yang mempunyai bentuk yang jelas tanpa disertai dengan kepemilikan barang tersebut. Menyewa sawah sebenarnya merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Sewa persawahan ini disebabkan oleh tingginya keinginan masyarakat untuk menyewa persawahan atau lahan pertanian guna memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Sewa sawah di Desa Kedung Boto dilakukan dalam dua sistem yaitu sistem membayar di depan dan sistem bayar *mburi* (di belakang ketika selesai panen). Pada penelitian ini penulis meneliti tentang sistem bayar *mburi*. Sewa sawah dengan bayar *mburi* yang terjadi di Desa Kedung Boto dalam pelaksanaannya melibatkan dua pihak yaitu pihak orang yang menyewa sawah dan pihak orang yang mempunyai sawah. Perjanjian sewa menyewa dengan sistem bayar *mburi* ini terjadi setelah kedua belah pihak orang yang mempunyai sawah dan orang yang menyewa sawah telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa sawah.

2) Ibu Mutmainah



Gambar 3.4 wawancara dengan ibu Mutmainnah

Ibu Mutmainah memaparkan alasan menyewakan sawah yang dimilikinya yang mempunyai luas 80 boto karena umur beliau yang sudah tua dan sudah tidak ada lagi yang mengurus sawah ibu Mutmainah semenjak suaminya meninggal. Dan itu menjadikan alasan utama untuk menyewakan sawahnya karena upah tersebut dibuat beliau untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya karena ibu Mutmainah tidak ingin merepotkan anak-anak beliau.⁹

Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh para pihak yang menyewakan sawah dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan yang melatar belakangi para pihak melakukan perjanjian sewa menyewa sawah, yaitu sebagai berikut :

1) Keterbatasan waktu

Disebabkan penggarapan sawah yang membutuhkan waktu yang sangat lama , seharian harus berada di sawah untuk mengawasi sawahnya . Dan

⁹ Mutmainnah, *wawancara*, rumah ibu Mutmainnah, 27 Januari 2021

tambahan kebutuhan sehari-hari beliau. Dan karena sudah meng
orang yang menyewa sawah sawah sehingga pembayarannya p
di bayar di akhir ketika sudah panen.¹¹

Berdasarkan pemaparan yang di jelaskan oleh para pihak oran
menyewa sawah sawah dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan
melatar belakangi para pihak melakukan perjanjian sewa menyewa
yaitu sebagai berikut :

- 1) Tambahan Penghasilan

Alasan utama para pihak orang yang menyewa sawah sawa
untuk menambah penghasilan dikarenakan kebutuhan pokok
semakin naik. Sebagai orang yang menyewa sawah mereka be

menyewa sawah sawah dapat diketahui bahwa ada beberapa alasan melatar belakangi para pihak melakukan perjanjian sewa menyewa yaitu sebagai berikut :

- 1) Tambahan Penghasilan

Alasan utama para pihak orang yang menyewa sawah sawah untuk menambah penghasilan dikarenakan kebutuhan pokok semakin naik. Sebagai orang yang menyewa sawah mereka be

1) **Tambahan Penghasilan**

Alasan utama para pihak orang yang menyewa sawah sawa untuk menambah penghasilan dikarenakan kebutuhan pokok semakin naik. Sebagai orang yang menyewa sawah mereka be

untuk menambah penghasilan dikarenakan kebutuhan pokok semakin naik. Sebagai orang yang menyewa sawah mereka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari sawah yang mereka sewa sebagai mata pencaharian tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki sawah sendiri yang memiliki sedikit sawah dapat menyewa persawahan.

¹¹ Yateman, *wawancara*, rumah bapak Yateman, 27 Januari 2021

2) Waktu pembayaran

Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kegiatan sewa menyewa yaitu waktu pembayarannya bisa dilakukan ketika sudah mendapatkan hasil panen, dan tidak harus di bayar ketika melaksanakan akad perjanjian sewa menyewa. Sehingga ada kelonggaran dalam melaksanakan penggarapan sawah di karenakan kebutuhan untuk menggarap sawah pun tidak sedikit.

b. Sighat (Ijab Qabul)

Faktor utama dari sebuah perjanjian adalah kedua belah pihak dalam perjanjian harus menyatakan kesediaan mereka untuk mengadakan perjanjian *ijarah*. Jika salah satu dari keduanya terpaksa bertransaksi, maka akad *ijarah* semacam ini batal.

Ijab qabul yang dilakukan kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan transaksi tersebut dilaksanakan setelah timbulnya kesepakatan antara *musta'jir* dan *mu'jir* untuk menyewa dan menyewakan sawah. Setelah timbulnya kesepakatan antara kedua pihak untuk melaksanakan kontrak mereka untuk membuktikan bahwa kegiatan perjanjian sewa telah disepakati.

Pelaksanaan ijab qabul antara *mus'tajir* dan *mu'jir* dilakukan secara lisan , jadi timbulnya perjanjian ini atas dasar kepercayaan antara *musta'jir* dan *mu'jir* , karena menurut pihak yang menyewakan sawahnya karena mereka sudah kenal dekat jadi kalo seumpama ada kesalah pahaman bisa di atasi dengan jalan musyawarah.

c. Manfaat Sewa Menyewa Sawah

d. Ujrah (Upah Sewa Menyewa)

[illegible]

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO 112/DSN-

MUI/IX/2017 TERHADAP SEWA MENYEWA SAWAH BAYAR MBURI

A. Analisis Praktek Sewa Menyewa Sawah Bayar *Mburi* Di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Perjanjian sewa menyewa yang dijadikan subjek oleh penulis dalam penelitian ini adalah perjanjian sewa menyewa sawah yang terjadi di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Praktek yang terjadi merupakan praktek pelaksanaan sewa menyewa sawah yang biasa masyarakat Desa Kedung Boto menyebutnya dengan sewa menyewa sawah bayar *mburi*, yang pada bab sebelumnya sudah di jelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yang akan kemudian di analisis dalam bab empat ini.

Perjanjian sewa menyewa sawah bayar *mburi* adalah perjanjian sewa sawah yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Boto Kec Porong Ka Sidoarjo, dimana petani sebagai pihak orang yang menyewa sawah dan orang yang mempunyai sawah sebagai pihak yang menyewakan sawah, dengan ketentuan pihak orang yang menyewa sawah memberikan upah sebagai pergantian atas manfaat yang sudah diambil dari sawah tersebut berupa uang tunai dan bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian di awal dan upah tersebut akan di bayarkan ketika di akhir atau ketika sudah panen.

Perjanjian sewa menyewa sawah bayar *mburi* ini dilakukan oleh petani Desa Kedung Boto yang tidak memiliki sawah untuk dijadikan sebagai lahan

Alat pembayaran sewa menyewa sawah ini menggunakan uang dan presentase hasil panen sebesar 25% sesuai dengan perjanjian ketika akad. Penentuan harga sewa sawah biasanya dilihat dari letak sawah (jarak dari pemukiman warga) , luas sawah (karena di Desa Kedung Boto ada dua tipe luas sawah yaitu 80 boto dan 140 boto, hitungan boto ini tidak ada ukuran pasti , dan menurut pihak perangkat desa menjelaskan bahwa 80 boto ukurannya kurang lebih 1200 M² dan 140 boto ukurannya kurang lebih 2200 M²) , kesuburan tanahnya (dekat dengan sumber air atau tidak). Pada kegiatan sewa menyewa ini pihak yang mempunyai sawah tidak ikut andil dalam pelaksanaan sewa menyewa karean semua biaya sudah diserahkan kepada pihak orang yang menyewa sawah sawah.

57

Berakhirnya perjanjian sewa menyewa sawah sistem bayar *mburi* ini ketika masa panen telah selesai dan ketika orang yang menyewa sawah sudah membayarkan upah yang sesuai dengan perjanjian di awal, setelah itu orang yang menyewa sawah mengembalikan sawah tersebut kepada orang yang mempunyai sawah, dengan demikian hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah terpenuhi. Akan tetapi jika salah satu pihak meninggal di tengah-tengah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini maka pelaksanaan perjanjian dilanjutkan sesuai kesepakatan dengan mewariskannya kepada salah satu pihak seperti istri atau anak-anaknya yang mampu meneruskan perjanjian sewa menyewa sawah tersebut. Jika tidak ada pihak keluarga yang dapat diwarisi, maka perjanjian sewa menyewa sawah sistem bayar *mburi* ini dianggap berakhir dengan ketentuan apabila masih mempunyai keluarga namun tidak mampu mengelola sawah, maka sawah yang sudah terlanjur ditanami bisa digantikan petani yang lain untuk meneruskan menggarap sawahnya dengan penggantian sejumlah biaya sewa dan perkiraan biaya perawatan yang sudah dikeluarkan, kemudian uang tersebut diberikan kepada keluarga pihak orang yang menyewa sawah yang dahulu. Namun, jika sudah tidak ada lagi keluarga dari orang yang menyewa sawah yang meninggal tersebut, maka uang penggantian tersebut diserahkan kepada pemerintah desa dan dimasukkan sebagai uang kas desa.

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Sawah Bayar *Mburi* Di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

Para ahli hukum sepakat bahwa *ijarah* adalah akad yang diijinkan oleh syara', namun terdapat perbedaan pendapat diantara ulama seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin' Aliyah, Hasan Al-Basri, Al-Qasyani, Nahrawi dan Ibnu Kisam, sebagian ulama tidak memperbolehkan *ijarah* karena menurut mereka *ijarah* adalah keuntungan jual beli, sedangkan manfaat pada saat akad dilaksanakan tidak dapat diserahkan, sedangkan sesuatu yang tidak terlihat pada saat akad dilaksanakan. tidak bisa diperdagangkan. Pendapat sebagian ulama tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd jika manfaat ketika akad belum ada, tetapi dalam hal manfaat akan terwujud dan hal ini menjadi pertimbangan syara'.¹

[illegible]

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Begitu juga dalam Al-Qur'an terdapat alasan para ahli hukum islam memperbolehkan *ijarah* terdapat dalam Q.S. At-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Dalam pengertian ijarah menurut syara 'adalah bentuk akad untuk kemaslahatan yang dipahami, disengaja dan menerima penyerahan, serta diperbolehkan dengan penggantian yang jelas. *Ijarah* juga sering disebut sebagai pengalihan hak pakai atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan hak kepemilikan atas barang tersebut.

Dalam perjanjian sewa persawahan yang dilakukan di Desa Kedung Boto Kec Porong Kab Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam karena telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan jumhur ulama

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2014), Surat Al-Baqarah ayat 233, 37.

Sistem sewa menyewa sawah bayar *mburi* ditinjau dari rukun sewa menyewa yaitu ada empat rukun, diantaranya sebagai berikut⁴ :

Orang yang melakukan *ijarah* ada dua pihak yaitu *Mu'jir* sebagai orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan dan *Musta'jir* sebagai orang memberikan upah atau orang yang menyewa sawah, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan transaksi *ijarah* yaitu bapak Yateman dan bapak Sugito sebagai *Musta'jir*, dan untuk pihak *Mu'jir* penulis mewawancarai Ibu Mutmainnah dan Bapak Abdul Hadi.

adanya *shighat* (ijab dan qabul) antara kedua belah pihak yang dilakukan di rumah orang yang mempunyai sawah dan ijab qabulnya menggunakan bahasa sehari-hari.

c. *ujrah* (upah/imbalan)

ujrah harus diketahui dengan jelas dan detail mengenai jumlahnya dan *ujrah* perjanjian sewa menyewa sawah sistem bayar *mburi* berupa uang dan bagi hasil yang berikisaran tergantung dengan sawah yang di sewa. Sawah dengan luas 80 boto harga umunya Rp. 750.000,- untuk sewa sawah satu tahun dan Sawah dengan luas 140 boto harga umumnya Rp. 1.200.000,- .

d. Manfaat

Salah satu cara mengetahui manfaat barang adalah ketika perjanjian menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Pada saat perjanjian dilakukan pihak orang yang menyewa sawah menjelaskan bahwa lahan sawah akan ditanami padi dengan jangka waktu satu tahun untuk 2 kali panen.

Di samping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang di jelaskan oleh Prof. Abu Azzam dalam bukunya⁵, di antaranya adalah :

a. Kedua belah pihak yang bersangkutan harus menyetakan kesediannya dalam melakukan kesepakatan sewa sawah. Apabila dalam melakukan transaksi ada salah satu yang melakukan dengan cara terpaksa maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 29

⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2017) , 81

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

artinya : Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu "6

dalam hal sewa menyewa ini pihak orang yang menyewa sawah dan orang yang mempunyai sawah sudah rela dalam melakukan transaksi ini dengan disepakatinya pihak orang yang mempunyai sawah menyerahkan sawahnya untuk dikelola dan orang yang menyewa sawah sawah rela mengelola sawah yang di sewanya, maka dari itu untuk syarat yang pertama sewa menyewa sawah sistem bayar *mburi* memenuhi syarat yang pertama.

- b. Bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi sewa, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dituntut untuk matang dan berakal sehat. Semua pihak yang melakukan perjanjian sewa dengan pembayaran *mburi* di Desa Kedung Boto Kec Porong semuanya sudah matang dan berakal sehat karena hampir semua masyarakat yang melakukan transaksi sewa sewa persawahan di Desa Kedung Boto sudah berumah tangga dan diatas rata-rata. usia bukan anak-anak lagi.
- c. Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki ciri tertentu dan memiliki nilai manfaat

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-Kaffah, 2014), Surat An-Nisa ayat 29, 83

Dalam sewa menyewa bayar *mburi* yang terjadi di Desa Kedung Boto Kecamatan Porong masih ada beberapa orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan. Hal ini melanggar hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak orang yang menyewa sawah yaitu membayar uang sewa sesuai dengan waktu yang sudah dijelaskan dan hak yang harus di terima oleh orang yang mempunyai sawah yaitu menerima upah dari orang yang menyewa sawah sesuai dengan kesepakatan ketika perjanjian. Maka hal tersebut bisa disebut sebagai ingkar janji atau wanprestasi yang sebagaimana di jelaskan pada pasal 36 KHES.

Dalam praktek sewa menyewa sawah bayar *mburi* di dalam Fatwa DSN MUI No 112 Tahun 2017 tentang *Ijarah* yaitu bagian pertama : ketentuan umum, ketentuan ujah, dan ketentuan penutup.

Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfaah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa, *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa dalam akad *ijarah*, baik *musta'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum

[illegible]

Dalam persewaan persawahan, pembayaran mburi telah memenuhi beberapa aspek di atas yaitu adanya *mu'jir* dan *musta'jir* serta terdapat manfaat yang didapat saat melakukan proses persewaan persawahan dengan sistem pembayaran mburi di Desa Kedung Boto. Kec Porong, Kab Sidoarjo.

- Akad *Ijarah* boleh dilakukan oleh orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah I'tibariah/syakhshiyah hukmiah/ rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mu'jir*, *Musta'jir* dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad *ijarah* baik kewenangan yang bersifat *ashiyyah* maupun *niyabiyyah*.
- Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
- Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar upah.
- Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

⁸ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah*, 2017, (Jakarta : DSN-MUI, 2017) , 6

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis tentang pembayaran *mburi* sewa sawah di Desa Kedung Boto Kec Porong Kab Sidoarjo maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

- 69

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan :

Fatwa DSN No 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang ijarah

Buku :

- Al-Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Al-Ju'fi , Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abd Allah al-Bukhari,. 1422. *Shahih al-Bukhari*. juz III, No. 2280. Damaskus : Dar Thauq al-Najah.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu 'Abdullah Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Juz II, No Indeks 2164. Halb : Daar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Syafi'I. 2017. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Depok : Tazkia Cendekia
- Ashshofa, Burhan.2004. *Metode Penelitian Hukum* .Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Asra, Abuzar, dkk. 2014. *Metode Penelitian Survey*. Bogor : IN MEDIA.
- Al-Washil, Nash Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhaammad Azzam. 2009. *Qawa'idu Fiqhiyyah*. Jakarta : Hamzah.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang : UIN-Maliki Press.
- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*.Yogyakarta : Gramasurya.
- Kaisiram ,Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metodologi Penelitian* . Malang: UIN Maliki Press.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Kaffah.
- Mufidah ,Nadliyatul. 2019.*Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN SUNAN AMPEL*.Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Muhammad.2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muslich , Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah

Narbuko,Chalid dan Achmadi,Abu. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.

Pusat penkajian hukum islam dan masyarakat madani. 2017. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* . Depok : Kharisma Putra Utama.

Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum* .Jakarta : UI-Press.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press.

Suryana.2010. *Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan* .Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia

Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*. Tulungagung : Akademia Putaka.

Widi ,Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Internet

Humas BPS. *Jumlah Angkatan kerja*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/> diakses pada 5 November 2020

Kementrian Pertanian RI *Produksi Padi sawah*. Pusat data dan sistem kementrian pertanian <https://aplikasi2.pertanian.go.id/bdsp/id/lokasi>, diakses pada 5 November 2020

Nilai Indeks Ketahanan Pangan Sidoarjo Tahun 2019 Kalahkan Nasional. (n.d.) from <https://radasurabaya.jawapos.com/read/2020/02/15/179544/nilai-indeks-> diakses pada 6 November 2020

Jurnal Penelitian

Rohmatillah, Naila. *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan perjanjian sewa sawah nggantung pari di Desa becironegoro kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo*. Skripsi. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2016

Zamzami , Husnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuw benda*

